



Analisis Kebijakan Presiden Nayib Bukele dan Implikasi Terhadap Turunnya Kriminalitas di El Salvador

Muhammad Ghiyas Gaspah^{1*}, Agussalim Burhanuddin²

¹⁻² Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Korespondensi penulis: gaspahghiyas@email.com

Abstract. *This study analyzes the security policies implemented by President Nayib Bukele in El Salvador and their implications for crime rates and democratic institutions. Using a descriptive qualitative approach, the study finds that although crime has significantly declined, it has come at the cost of weakened democratic institutions, rising electoral authoritarianism, and the use of fear-based politics to gain public legitimacy. Mass detentions, reduced civil liberties, and the centralization of executive power show that stability is being built not through repressive control. Furthermore, vulnerable groups such as the poor and women are disproportionately affected between public security and human rights protection to avoid deepening structural inequalities and creating new forms of social vulnerability.*

Keywords: *Democracy, Human Rights, Security, Vulnerable Groups, Populism.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis kebijakan keamanan yang diterapkan oleh Presiden Nayib Bukele di El Salvador serta dampaknya terhadap kriminalitas dan demokrasi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun angka kejahatan mengalami penurunan signifikan, pencapaian tersebut disertai oleh pelemahan institusi demokrasi, peningkatan otoritarianisme elektoral, serta penggunaan politik ketakutan untuk memperoleh legitimasi publik. Penahanan massal, pengurangan kebebasan sipil, dan dominasi kekuasaan eksekutif menunjukkan bahwa stabilitas yang dibangun tidak didasarkan pada partisipasi demokratis, melainkan pada kontrol represif. Selain itu, kelompok rentan seperti Masyarakat miskin dan Perempuan menjadi pihak paling terdampak oleh pendekatan koersif negara. Temuan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara keamanan dan perlindungan hak asasi manusia agar kebijakan tidak justru menciptakan ketimpangan struktural dan kerentanan sosial yang baru.

Kata kunci: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Keamanan, Kelompok Rentan, Populisme

1. LATAR BELAKANG

El Salvador, sebuah negara kecil di Amerika Tengah, telah tercatat sebagai salah satu negara dengan Tingkat kriminalitas dan bahaya tinggi, dengan tingkat pembunuhan yang sangat tinggi akibat dominasi geng kriminal seperti MS – 13 dan Barrio 18. Geng- geng ini tidak hanya mengendalikan wilayah, tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat dengan menggunakan kekerasan sebagai alat kontrol. Upaya pemerintah sebelumnya untuk memberantas kejahatan, seperti kebijakan “Mano Dura” pada awal 2000-an, tidak menunjukkan hasil yang signifikan dan justru memperkuat jaringan geng melalui sistem penjara yang tidak memadai (Rosen, Cutrona, & Lindquist, 2022.)

Ketika Nayib Bukele terpilih sebagai presiden pada tahun 2019, ia membawa harapan akan pendekatan baru yang lebih efektif dalam menangani persoalan kriminalitas. Salah satu kebijakan utamanya adalah *Plan Control Territorial*, yang diklaim sebagai strategi

komprehensif untuk mengendalikan wilayah yang sebelumnya dikuasai geng, meningkatkan kehadiran aparat keamanan, dan memperbaiki infrastuktur negara. Langkah ini diiringi dengan peningkatan penggunaan teknologi pengawasan dan komunikasi public yang agresif untuk membangun legitimasi pemerintah (Melendez-Sanchez & Vergara, 2024). Kebijakan-kebijakan tersebut menghasilkan yang tampak nyata dalam kurun waktu singkat. Menurut data pemerintah EL Salvador, angka pembunuhan tahunan menurun drastis dari 52 per 100.000 penduduk pada 2018 menjadi sekitar 7,8 pada tahun 2022. Penurunan ini menjadikan El Salvador termasuk dalam daftar negara paling aman dengan tingkat kriminalitas minim di Amerika Latin dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Namun, efektivitas kebijakan ini menuai perdebatan, terutama karena keberhasilan tersebut juga diduga melibatkan kesepakatan tersembunyi antara pemerintah dan kelompok geng. Selain pendekatan militeristik, pemerintah Bukele juga menetapkan status darurat nasional sejak Maret 2022 yang memungkinkan aparat keamanan melakukan penangkapan tanpa surat perintah. Hingga 2023, lebih dari 70.000 orang telah ditahan dengan tuduhan keterlibatan dalam aktivitas geng. Meskipun kebijakan ini dianggap sukses dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, banyak organisasi HAM mengkritik pelanggaran prinsip *due process* serta kondisi penahanan yang buruk (Rosen, Cutrona, & Lindquist, 2022.)

Bukele juga mengkonsolidasikan kekuasaan politiknya dengan cara mengganti hakim Mahkamah Agung dan Jaksa Agung, yang menimbulkan kekhawatiran akan erosi terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Para analis menyebut bahwa kebijakan keamanan Bukele merupakan bagian dari model baru pemerintahan yang disebut sebagai “otorianisme populis”, di mana efektivitas keamanan dijadikan legitimasi untuk membungkam oposisi politik dan membatasi kebebasan politik (Melendez-Sanchez & Vergara, 2024). Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan keamanan yang diterapkan oleh Presiden Nayib Bukele dalam konteks penurunan kriminalitas di El Salvador. Selain mengevaluasi efektivitas dari *Plan Control Territorial* dan kebijakan darurat nasional, analisis ini juga mempertimbangkan implikasi kebijakan tersebut terhadap institusi demokrasi, hak asasi manusia, dan masa depan stabilitas negara. Kajian ini penting tidak hanya untuk memahami fenomena transformasi keamanan di El Salvador, tetapi juga sebagai pelajaran bagi negara lain yang menghadapi ancaman serupa dari kekuatan kriminal bersenjata.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kemanan Manusia

Konsep *human security* berkembang sebagai respons terhadap pendekatan keamanan tradisional yang terlalu berfokus pada negara (*state-centered security*). Dalam paradigma ini, keamanan tidak lagi hanya berarti perlindungan dari ancaman militer, tetapi mencakup perlindungan individu dari kekerasan, kemiskinan, pelanggaran HAM, dan ketidakstabilan sosial. Fokusnya adalah pada kesejahteraan manusia dan hak-hak dasar. Kebijakan Presiden Bukele dalam memberantas kriminalitas memang menurunkan angka kekerasan fisik, tetapi dilaksanakan dengan cara yang mengorbankan hak-hak sipil dan prosedur hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keamanan fisik meningkat, *human security* secara menyeluruh justru terganggu.

Teori Otoritarianisme Populis

Authoritarian polism adalah bentuk pemerintahan yang menggunakan legitimasi rakyat (*populisme*) untuk membatasi institusi-institusi demokrasi seperti peradilan independen, media bebas, dan oposisi politik. Dalam hubungan internasional, tren ini berimplikasi pada pembentukan aliansi antarpemimpin otoriter, pelemahan norma-norma global tentang demokrasi dan HAM, serta polarisasi nilai-nilai dalam tatanan internasional (Levitsky & Way, 2022). Dalam kasus El Salvador, Bukele membingkai keberhasilannya dalam mengatasi kriminalitas sebagai bukti efektivitas sistem yang tidak terlalu terikat oleh “prosedur demokrasi”. Pendekatan ini menarik perhatian negara lain yang menghadapi tantangan serupa, dan dapat mendorong normalisasi model otoriter dalam politik global.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menyajikan gambaran yang sistematis mengenai fenomena yang dikaji kebijakan-kebijakan keamanan yang diterapkan oleh Presiden Nayib Bukele dan mengevaluasi dampaknya terhadap kriminalitas serta institusi demokrasi di El Salvador. Pendekatan ini dipilih karena cocok untuk menganalisis fenomena-fenomena sosial-politik yang kompleks dan dinamis, serta menekankan makna dan interpretasi dari kebijakan yang dikaji (Creswell, 2013). Dalam konteks ini, metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami tidak hanya fakta empiris, tetapi juga persepsi, narasi, dan strategi yang digunakan oleh aktor-aktor politik dalam membentuk kebijakan publik. Data diperoleh melalui studi pustaka, laporan organisasi internasional, serta artikel media massa yang relevan. Analisis difokuskan pada bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi struktur demokrasi, hak asasi manusia, dan

stabilitas sosial. Dengan begitu, penelitian ini memberikan Gambaran mengenai hubungan antara keamanan, legitimasi politik, dan kualitas demokrasi dalam rezim populis kontemporer.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan keamanan yang diterapkan oleh Presiden Nayib Bukele melalui *Plan Control Territorial* dan pemberlakuan status darurat nasional sejak maret 2022 telah menunjukkan hasil yang mencolok dalam hal penurunan tingkat kejahatan. Berdasarkan laporan Human Rights Watch, tingkat pembunuhan di El Salvador turun dengan cukup signifikan dari 52 per 100.000 penduduk pada 2018 menjadi sekitar 7,8 pada 2022. Keberhasilan ini, menjadi simbol kuat dari transformasi keamanan di negara yang sebelumnya termasuk dalam kategori wilayah paling rawan secara global (Human Rights Watch, 2023).

Namun, penurunan angka kriminalitas ini diiringi oleh tindakan represif negara terhadap warganya. Amnesty Internasional telah melaporkan lebih dari 70.000 orang telah ditangkap tanpa surat perintah, dan Sebagian besar tidak diberikan akses terhadap pengacara atau proses hukum yang adil. Amnesty menyebut pendekatan Bukele sebagai “model keamanan yang dibangun di atas pengorbanan hak asasi manusia,” di mana sistem peradilan dijalankan dengan prinsip kolektif, bukan individual (Erika Guevara-Rosas, 2024). Kondisi penahanan juga menjadi sorotan; penyiksaan, kematian tahanan, serta kondisi penjara yang sangat padat menjadi ancaman terhadap prinsip-prinsip dasar *human security* yang menjunjung martabat manusia. Dalam kerangka teori *human security*, focus keamanan tidak hanya pada absennya kekerasan, tetapi juga pada jaminan hak-hak dasar, akses keadilan, dan kebebasan dari ketakutan dan kebutuhan. Dengan menggunakan perspektif ini, kebijakan Nayib Bukele dapat dipandang menciptakan “keamanan semu” yang di mana kekerasan gen memang berkurang, tetapi digantikan oleh ketakutan terhadap negara sendiri. Lebih dari itu, konsolidasi kekuasaan oleh Nayib Bukele semakin memperkuat dugaan bahwa ia menerapkan pola *Otorianisme populis*. Dalam artikel analisis oleh Jacobo Garcia dan Carlos Martinez di *El Pais*, Nayib Bukele telah menggantikan lima hakim Mahkamah Agung dan Jaksa Agung, serta menggunakan popularitasnya untuk mengubah konstitusi dan menghalangi oposisi. Langkah ini memperlihatkan upaya sistematis untuk mengikis institusi pengawasan dan memperkuat kekuasaan eksekutif dengan dalih efektivitas dan respon cepat terhadap kejahatan (Garcia & Martinez, 2025). Kondisi ini sejalan dengan teori Levitsky dan Way (2022) tentang otorianisme populis, di mana

pemimpin menggunakan retorika populis untuk melegitimasi erosi demokrasi. Dalam kasus El Salvador, argument keamanan dan ketertiban digunakan sebagai alat untuk mendesain ulang tatanan politik yang semakin otoriter.

Implikasi Jangka Panjang terhadap Demokrasi dan Kesejahteraan Manusia

Meskipun kebijakan Presiden Nayib Bukele berhasil menurunkan angka kriminalitas secara drastic, terdapat kekhawatiran mengenai dampak jangka Panjang terhadap stabilitas demokrasi dan kesejahteraan manusia di El Salvador

Dampak terhadap demokrasi

Konsolidasi kekuasaan oleh Bukele, termasuk penggantian hakim Mahkamah Agung dan Jaksa Agung, serta pemberlakuan status darurat nasional yang memperluas kewenangan aparat keamanan, telah mengurangi checks and balances dalam sistem politik di El Salvador. Langkah-langkah ini memperburuk kualitas demokrasi dan berisiko megarah pada *competitive authoritarianism*, di mana pemilu tetap diadakan, namun institusi demokrasi dilemahkan untuk memastikan kemenangan pemimpin yang berkuasa. Menurut analisis dari *Journal of Democracy*, meskipun pemilu tetap berlangsung, bukele dan sekutunya telah secara sistematis melanggar aturan demokratis inti untuk keuntungan mereka sendiri, menyalahgunakan sumber daya dan institusi negara untuk merugikan oposisi, serta mengendalikan Lembaga-lembaga pengawas seperti pengadilan dan komisi pemilu.

Bukele merepresentasikan tipe baru memimpin populis yang menggunakan popularitas untuk menciptakan tipe baru pemimpin populis yang juga pastinya menggunakan popularitas untuk menciptakan sistem otoriter melalui jalur electoral, dengan membatasi oposisi dan menekankan kebebasan pers, sambil tetap mempertahankan legitimasi public melalui narasi keberhasilan kebijakan keamanan. (Jennifer McCoy, 2023). Selain itu, penggunaan militer dalam fungsi-fungsi sipil, seperti mengontrol wilayah yang dianggap berbahaya, menandai pergeseran militerisasi dalam politik domestik yang membatasi ruang sipil dan menekan hak asasi manusia. Para pengkritik khawatir bahwa normalisasi status darurat dapat melembagakan praktik represif dan menciptakan preseden berbahaya bagi penerus Nayib Bukele, bahkan jika popularitasnya saat ini tinggi. Jika institusi demokrasi terus dilemahkan. Resiko terjadinya pemerintahan yang semakin otoriter menjadi nyata, sekaligus mengurangi kapasitas masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi politik secara bebas dan adil di masa depan.

Dampak terhadap Kesejahteraan Manusia

Pendekatan keamanan yang represif, seperti penahanan massal terhadap puluhan ribu orang tanpa proses hukum yang jelas dan kondisi penahanan yang buruk. Hal ini telah

menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Amnesty Internasional melaporkan bahwa lebih dari 70.000 orang telah ditahan sejak pemberlakuan status darurat nasional pada Maret 2022, dengan banyak di antaranya tidak mendapatkan akses ke pengacara atau proses hukum yang transparan. Selain itu, kondisi penahanan yang padat dan tidak manusiawi dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan kekerasan di dalam penjara. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga berpotensi memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Kelompok-kelompok rentan, seperti kaum muda, perempuan, dan komunitas miskin, sering kali menjadi sasaran utama dari penahanan massal ini, meskipun mereka tidak terlibat dalam aktivitas kriminal. Hal ini dapat memperburuk marginalisasi sosial mereka dan menghambat akses terhadap Pendidikan, pekerjaan, dan layanan Kesehatan.

Lebih jauh lagi, kebijakan represif yang mengedepankan keamanan tanpa memperkuat aspek sosial, seperti rehabilitasi, Pendidikan, dan pembangunan ekonomi komunitas, berisiko menciptakan lingkaran kekerasan jangka Panjang. Anak-anak dan remaja yang menyaksikan perlakuan kekerasan terhadap komunitas yang mereka jalani mungkin sudah kehilangan kepercayaan terhadap aparaturnegara, yang dapat menghambat pembangunan modal sosial. Dan dalam jangka Panjang, pendekatan inilah yang justru dapat memperdalam ketidakstabilan structural dalam masyarakat El Salvador (IACHR, 2024). Menurut laporan dari Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), kebijakan keamanan yang diterapkan di El Salvador telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, yang dalam hal ini sudah termasuk penahanan sewenang-wenang dan kondisi penahanan yang tidak manusiawi.

Pelanggaran terhadap Human Security

Dalam perspektif *human security*, kebijakan Nayib Bukele bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap martabat dan hak asasi individu. Penahanan massal terhadap puluhan ribu orang tanpa proses hukum yang jelas merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan dan perlindungan hukum. Amnesty Internasional menyebutkan bahwa banyak warga yang ditahan tanpa dakwaan yang jelas, bahkan hanya berdasarkan tampilan fisik atau tempat tinggal mereka (Erika Guevara-Rosas, 2024).

Lebih dari itu, kebijakan tersebut menciptakan efek ketakutan di masyarakat sipil, di mana warga enggan mengkritik kebijakan pemerintah karena takut dikaitkan dengan kelompok kriminal. Ini menandakan penurunan kualitas *human security*, karena keamanan fisik dicapai dengan mengorbankan kebebasan sipil dan akses terhadap keadilan. Ketakutan terhadap represi telah menciptakan budaya diam, di mana masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan media terasa terintimidasi. Dalam hal ini, *human security* yang seharusnya

mencakup Hak dasar berupa terbebas dari rasa takut dan kekurangan mengalami kemunduran dan tidak lagi terlindungi sepenuhnya. Warga yang kehilangan anggota keluarganya karena penahanan yang sewenang-wenang secara psikologis dan ekonomi pasti mengalami tekanan yang tinggi. Hal tersebut pastinya memperburuk kondisi kesejahteraan mereka. Pendekatan keamanan yang tidak memikirkan dimensi hak asasi manusia dan pemberdayaan sosial justru mengikis fondasi keberlanjutan jangka Panjang dari kemanan itu sendiri. Dalam jangka Panjang, pelanggaran terhadap *human security* berisiko menciptakan generasi yang nantinya sudah susah untuk percaya pada institusi negara dan memperpanjang siklus ketidakstabilan sosial serta kekerasan struktural dalam masyarakat El Salvador.

Tantangan terhadap Model Keamanan Berbasis Kesejahteraan Manusia

Pendekatan Nayib Bukele berfokus pada penegakan hukum yang keras bertentangan dengan prinsip-prinsip *human security*, yang menekankan pentingnya perlindungan HAM, keterjangkauan sistem peradilan bagi semua pihak, dan pemberdayaan individu. Meskipun kebijakan Bukele berhasil mengurangi angka kekerasan dalam jangka pendek, namun pendekatan ini mengabaikan faktor-faktor struktural yang mendasari kekerasan, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kurangnya kesempatan ekonomi. Tanpa adanya reformasi sosial dan ekonomi yang mendalam, penurunan angka kriminalitas yang dicapai melalui pendekatan represif ini mungkin tidak akan bertahan lama dan dapat berisiko menciptakan siklus kekerasan baru.

Pendekatan yang terlalu fokus pada aspek keamanan yang tidak disertai dengan adanya upaya pemberdayaan masyarakat dapat menghambat pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, sebenarnya penting untuk mempertimbangkan model keamanan yang *holistic*, yang tidak hanya menekan angka kriminalitas tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat yang disuarakan oleh Elpeni Fitrah, yang menekankan bahwa keberhasilan dalam menciptakan keamanan sejati harus menyentuh dimensi kemanusiaan secara utuh, termasuk perlindungan terhadap hak sipil, pemberdayaan ekonomi, dan inklusi sosial. Ketika keamanan dipahami hanya sebagai absennya kekerasan, negara berisiko untuk mengabaikan kebutuhan manusia yang lebih kompleks, seperti pendidikan, Kesehatan, dan keadilan sosial. Pendekatan yang terlalu koersif, tanpa pondasi kesejahteraan yang kuat, hal ini hanya akan menimbulkan ketidakpuasan sosial dan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Elpeni Fitrah, 2025).

Dampak sosial dan Ketidaksetaraan

Kebijakan represif ini juga memperburuk marginalisasi kelompok sosial tertentu. Di negara ini, Sebagian besar tahanan berasal dari wilayah miskin yang sekama ini kurang mendapatkan layanan publik. Tidak sedikit anak muda yang ditahan hanya karena hidup di lingkungan yang distigmatisasi sebagai basis geng, (Carolina Lopez, 2023). Penahanan tanpa proses hukum dan dampak psikososial terhadap keluarga korban menjadi tantangan serius bagi rekonsiliasi sosial jangka Panjang di El Salvador.

Pendekatan keamanan yang menitikberatkan pada penindakan keras tanpa disertai upaya rehabilitasi sosial dapat memperburuk masalah ketidaksetaraan sosial. Hal ini selaras dengan gagasan yang dikemukakan oleh (Prakasa, 2021) yang menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat marjinal di era modern, di mana seperti yang kita rasakan sekarang bahwa kebijakan yang tidak inklusif dapat memperburuk kondisi kelompok yang lemah. Kita juga harus paham bahwa hukum sepantasnya digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan (Sriwidodo, 2020). Namun, Ketika hukum digunakan sebagai alat represif tanpa mempertimbangkan aspek sosial, hal inilah yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pemerintah. Ketika hukum diterapkan secara represif tanpa adanya pendekatan yang humanis, hal ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga memperkuat polarisasi sosial. Masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak adil cenderung menarik diri dari proses demokratis dan memilih untuk tidak berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Akibatnya, legitimasi negara dalam menegakkan hukum melemah, dan potensi konflik sosial di tingkat akar rumput pun meningkat.

Paradoks Keamanan dan Otorianisme Elektoral

Kebijakan Nayib Bukele menunjukkan paradoks antara keberhasilan penurunan angka kriminalitas dan meningkatnya kecenderungan otorianisme elektoral. Penurunan kejahatan yang drastis memang merupakan pencapaian signifikan, namun hal ini tidak dapat dilepaskan dari metode represif yang digunakan pemerintahannya. Dalam studi tentang dinamika transisi demokrasi, Kita harus sadar bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari adanya pemilu, melainkan juga dari kualitas kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat, supremasi hukum, dan independensi Lembaga negara. Jika pemilu tetap diadakan namun Lembaga-lembaga pengawasan dilemahkan, maka negara berisiko jatuh pada *pseudo-democracy* yang hanya tampak demokratis di permukaan, padahal aslinya hancur. Pendekatan keamanan yang diambil oleh Nayib Bukele banyak mendapatkan pujian dari masyarakat El Salvador karena secara nyata sukses menurunkan

angka kejahatan, khususnya untuk kasus pembunuhan dan kekerasan yang selama ini mendominasi kehidupan sosial. Akan tetapi, kesuksesan dalam menurunkan angka kejahatan ini dibarengi dengan serangkaian kebijakan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan demokrasi di negara tersebut. Salah satu contohnya adalah dengan pemberlakuan *estado de excepsion* (keadaan darurat) yang memiliki potensi terjadinya penangkapan massal tanpa proses hukum yang memadai, pembatasan kebebasan berkumpul, serta pelarangan atas kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, Tindakan Presiden Nayib Bukele tidak semata-mata berfungsi sebagai kebijakan keamanan, tetapi juga sebagai strategi konsolidasi kekuasaan.

Konsekuensi dari Langkah-langkah ini adalah melemahnya mekanisme *checks and balances* yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam sistem pemerintahan demokratis. Dengan menguasai legislatif dan menempatkan loyalis di posisi kunci peradilan, Bukele menciptakan struktur pemerintahan yang minim pengawasan dan cenderung menempatkan kekuasaan eksekutif di atas institusi lainnya. Dapat dilihat bahwa hal ini menunjukkan penurunan kualitas demokrasi meskipun proses elektoral tetap berjalan secara regular. Situasi ini memperlihatkan ironi di masyarakat yang di mana rakyat tetap memberikan legitimasi melalui pemilu. Namun, mereka secara bersamaan kehilangan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang mendasar. Dukungan masyarakat yang tinggi terhadap Nayib Bukele juga mencerminkan bagaimana rasa aman sering kali diprioritaskan di atas kebebasan. Dalam masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketakutan akibat dominasi geng kriminal seperti MS-13 dan Barrio-18, perlakuan keras negara dipandang sebagai solusi akhir. Namun, kecenderungan ini berkembang Ketika mampu bertahan dan berkembang Ketika dapat memenuhi kebutuhan mendasar rakyat, sekalipun melalui pendekatan koersif. otoritarianisme electoral memperoleh legitimasi dari respon instan terhadap krisis sosial, bukan dari proses deliberatif yang demokratis.

Implikasi dari model pemerintahan seperti ini tidak hanya berdampak terhadap dinamika politik domestik, tetapi juga mengancam posisi El Salvador dalam komunitas Internasional yang menekankan prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap HAM. Beberapa organisasi dunia, seperti Amnesty Internasional dan Human Rights Watch yang aktif dalam menyuarakan isu ini. Mereka juga telah menyoroti pelanggaran sistemik terhadap hak asasi manusia selama masa darurat yang diberlakukan Nayib Bukele. Meskipun demikian, Nayib Bukele tetap mempertahankan retorika bahwa Tindakan keras diperlakukan untuk menyelamatkan generasi masa depan dari siklus kekerasan. Narasi ini efektif secara politis, tetapi pada saat yang sama mengaburkan batas antara pemimpin yang

kuat dan pemimpin yang otoriter. Dengan demikian, paradoks antara keberhasilan keamanan dan kecenderungan otoritarianisme dalam kebijakan Nayib Bukele menjadi isu penting dalam kajian tata Kelola pemerintahan kontemporer. Stabilitas yang dibangun melalui pendekatan yang represif tidak dapat serta-merta dianggap sebagai bentuk legitimasi kekuasaan yang sah, terutama Ketika mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Masyarakat El Salvador saat ini tampak menerima penurunan kualitas demokrasi sebagai konsekuensi dari peningkatan rasa aman. Namun, toleransi ini bukanlah hal yang bersifat permanen. Ketika ruang-ruang kebebasan sipil terus menyempit dan mekanisme akuntabilitas melemah, risiko terhadap keberlangsungan demokrasi semakin besar. Oleh Karena itu, kesuksesan dalam menciptakan keamanan harus dibarengi komitmen kuat terhadap nilai-nilai demokratis agar tidak berubah menjadi pembenaran bagi konsolidasi kekuasaan yang otoriter.

Stabilitas Sosial dan Peran Modal Sosial

Salah satu risiko dari pendekatan Nayib Bukele adalah hilangnya modal sosial, yaitu jaringan kepercayaan dan solidaritas yang menjadi pondasi stabilitas sosial. Jika masyarakat takut untuk berbicara atau mengkritik pemerintah, maka kapasitas kolektif untuk menyelesaikan konflik secara damai akan tergerus. Penurunan kepercayaan terhadap institusi hukum dan negara akan memicu depolitisasi dan isolasi sosial di kalangan masyarakat bawah.

Situasi serupa terlihat di El Salvador, yang di mana komunitas miskin semakin menjauh dari proses politik karena merasa tidak mendapat perlindungan hukum yang adil. Ketakutan ini, jika terus berlangsung, akan berdampak pada degradasi modal sosial dan menghambat pemulihan pasac konflik. Nuugroho menegaskan bahwa keadilan sosial dan perlindungan HAM merupakan prasyarat utama bagi pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Ketika rasa takut menggantikan kepercayaan sebagai dasar hubungan antara warga negara dan negara, modal sosial yang selama ini menopang kehidupan komunitas berangsur-angsur tergerus. Dalam kondisi represif, masyarakat pastinya cenderung menarik diri dari ruang public dan melemahkan kapasitas kolektif dalam membangun solidaritas. Di El Salvador, berbagai laporan mencatat bahwa banyak komunitas yang sebelumnya aktif dalam kegiatan sosial dan advokasi mulai kehilangan semangat partisipatif akibat stigmatisasi, pengawasan, dan intimidasi dari aparat negara. Hal ini bukan hanya menghambat pemulihan sosial pasca kekerasan geng, tetapi juga memperlemah kohesi sosial yang diperlukan dalam membangun rekonsiliasi jangka Panjang. Peran modal sosial

dalam menjaga stabilitas tidak dapat dipisahkan dari adanya relasi yang sehat antara negara dan masyarakat. negara yang demokratis tidak hanya menciptakan hukum dan ketertiban, tetapi juga memperkuat ikatan sosial melalui pengakuan atas hak-hak warga negara. Jika pemerintah lebih memilih pendekatan koersif dan menutup ruang dialog, maka proses pembentukan kepercayaan timbal balik akan terganggu. Dalam konteks El Salvador, kebijakan Nayib Bukele yang menekankan pada keamanan melalui tindakan represif memperlihatkan kecenderungan negara untuk mengabaikan aspek-aspek sosial yang seharusnya menjadi prioritas dalam pemulihan pasca konflik. Ketidakseimbangan ini menciptakan jarak antara negara dan komunitas, yang kedepannya dapat memberikan pengaruh buruk terhadap ketahanan sosial.

Lebih lanjut, struktur sosial yang rapuh dapat memperbesar risiko radikalisme, kriminalisasi kelompok marginal, serta munculnya siklus kekerasan baru. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum, mereka berpotensi mencari jalur alternatif, termasuk yang bersifat ilegal, untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Kehadiran modal sosial yang kuat seperti jaringan komunitas, organisasi masyarakat sipil, dan forum partisipatif menjadi kunci dalam menghindari situasi tersebut. Namun, jika modal sosial tersebut dibatasi atau diberangus oleh negara, maka masyarakat akan kehilangan ruang untuk menyalurkan aspirasi dan keluhan secara damai. Kondisi El Salvador saat ini menunjukkan bahwa kesuksesan dalam menekan angka kriminalitas belum diiringi dengan penguatan jaringan sosial yang berkelanjutan. Banyak organisasi lokal yang merasa terpinggirkan dari proses pengambilan kebijakan, sementara media independen menghadapi tekanan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Dalam jangka pendek, situasi ini mungkin terlihat stabil, tetapi stabilitas semu ini dibangun di atas keterpaksaan, bukan partisipasi sukarela. Ketidadaan ruang untuk berekspresi dan berorganisasi secara bebas menjadi indikator awal dari melemahnya pondasi sosial demokratis. Rekonstruksi kepercayaan hanya dapat terjadi apabila negara membuka ruang bagi partisipasi yang setara dan memperlakukan semua warga negara dengan adil. Oleh karena itu, jika El Salvador ingin mencapai stabilitas sosial yang berkelanjutan, maka perlu ada pergeseran pendekatan dari sekadar keamanan represif menuju penguatan kapasitas sosial masyarakat. Investasi dalam Pendidikan, pembangunan komunitas, dan perlindungan hak sipil harus menjadi prioritas dalam proses transisi dari kekerasan menuju perdamaian. Modal sosial bukanlah elemen pelengkap, melainkan pondasi utama yang menentukan kualitas kehidupan berbangsa di tengah ketidakstabilan politik dan ekonomi.

Populis dan Legitimasi melalui ketakutan

Model pemerintahan Nayib Bukele juga dapat dibaca melalui lensa politik populis. Menurut (Wahyuni, 2023). politik populis cenderung membangun narasi “kami vs mereka” di mana pemerintah dianggap sebagai representasi rakyat dan oposisi dianggap sebagai pengkhianat. Di El Salvador, pemerintah menggunakan narasi perang melawan geng kriminal sebagai alat legitimasi politik, sambil membungkam kritik terhadap metode yang digunakan. Hal ini menciptakan ketakutan sebagai alat mobilisasi dukungan. Politik ketakutan ini rentan menghasilkan sistem pemerintahan otoriter karena masyarakat didorong untuk mendukung kebijakan represif sebagai bentuk perlindungan, bukan karena kesadaran hak dan kewajiban negara

Studi yang dilakukan oleh Jonathan Pollak menyebut pendekatan ini sebagai bentuk “emosional otoritarianisme”, di mana Nayib Bukele menggunakan kampanye konsep ketakutan sebagai instrument legitimasi. Narasi perang terhadap geng kriminal dan pendekatan represif terhadap kritikan bukan hanya soal keamanan, tetapi juga strategi politik untuk menumbuhkan dukungan luas, bahkan dengan mengorbankan kebebasan sipil (Jonathan Pollak, 2024). Strategi tersebut telah menumbuhkan apa yang disebut sebagai legitimasi melalui ketakutan. Masyarakat El Salvador mengorbankan banyak hak-hak sipil, seperti proses hukum yang adil dan kebebasan berpendapat karena mereka merasa aman. Kebijakan “Mano Dura” juga menginspirasi model otoritarianisme populis di Amerika Latin, di mana pengurangan kejahatan mendadak menarik dukungan luas meski dengan harga penurunan HAM. Lebih jauh, kerakutan politik populis yang dimanfaatkan oleh Nayib Bukele menunjukkan kecenderungan untuk menciptakan polarisasi yang tajam dalam masyarakat. Bukele menggunakan retorika antagonistik yang memisahkan antara “kami” sebagai representasi rakyat dan “mereka” sebagai simbol elit korup, media, dan oposisi. Narasi ini dapat membangun dukungan massa tanpa perlu membuka ruang dialog publik yang sehat. Ketika proses deliberatif digantikan oleh seranagn emosional terhadap lawan politik, maka nilai-nilai pluralisme dalam demokrasi mulai tergerus. Legitimasi pun diperoleh bukan dari kualitas kebijakan, melainkan dari kemampuan memainkan sentiment rakyat.

Strategi komunikasi yang digunakan Nayib Bukele juga menunjukkan kecenderungan pada pemusatan kekuasaan. Dengan mengendalikan narasi di media sosial dan melemahkan narasi fundi Lembaga pengawasan seperti legislatif dan peradilan. Bukele menciptakan sistem politik yang sangat bergantung pada figure tunggal. Retorika yang anti-kritik dan kondisi darurat yang diperpanjang membuat ruang demokrasi semakin sulit diakses. Dalam

situasi seperti ini, suara alternatif tidak hanya kehilangan tempat, tetapi juga mulai dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Dominasi satu suara menjadikan ruang publik homogen dan tidak memberi tempat bagi perbedaan pandangan. Pada Akhirnya, pendekatan yang mengandalkan ketakutan sebagai sumber legitimasi membawa dampak serius bagi masa depan demokrasi. Masyarakat didorong untuk menerima berkurangnya kebebasan sebagai konsekuensi dari rasa aman yang dijanjikan. Meski pendekatan ini efektif dalam jangka pendek untuk mengatasi krisis keamanan. Namun, dalam jangka Panjang berpotensi menciptakan normalisasi terhadap Tindakan otoriter. Ketika rasa tidak aman digunakan sebagai pembenaran untuk mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi, maka ruang kebebasan, independensi media, dan mekanisme pengawasab terhadap kekuasaan akan terus mengalami kemunduran

Perlindungan Hukum bagi Kelompok Rentan

Akhirnya, Aspek yang sering terabaikan adalah bagaimana kebijakan ini menimbulkan risiko besar bagi kelompok rentan, seperti Wanita, anak-anak, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam hal ini lah masyarakat harus sadar pentingnya pendekatan perlindungan hukum berbasis hak asasi bagi kelompok marginal. Kita harus sadar bahwa negara yang mengabaikan aspek keadilan distributif dalam kebijakan hukumnya justru akan memperbesar disparitas sosial dan menyuburkan ketimpangan structural. Di El Salvador, penahanan massal tanpa proses hukum yang adil sangat rentan berdampak pada masyarakat dengan latar belakang ekonomi lemah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum bekerja secara diskriminatif, yang berlawanan dengan prinsip universalitas hak asasi manusia. Negara seharusnya menyeimbangkan pendekatan represif dengan upaya mengadakan rehabilitasi dan reintegrasi untuk kelompok yang terdampak (Putri, 2020).

Pendekatan hukum represif yang diambil oleh pemerintahan Nayib Bukele tidak hanya mengikis hak-hak sipil secara umum, tetapi juga berdampak diskriminatif terhadap kelompok rentan seperti wanita, anak-anak dan masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak hanya itu, penahanan massal tanpa proses hukum yang layak cenderung menargetkan individu-individu yang tidak mampu membayar jaminan atau mendanai pembelaan hukum, sehingga memunculkan bias kelas ekonomi dalam akses keadilan. Masyarakat miskin, yang umumnya berasal dari Kawasan marginal, menjadi sasaran yang mudah karena minimnya pengetahuan, sumber daya, serta dukungan hukum.

Penekanan pada Tindakan koersif tanpa diimbangi program rehabilitasi atau reintegrasi turut menghancurkan peluang untuk pemulihan sosial. Bahkan, kelompok anak yang

terdampak geng criminal sering kali dianggap sekedar bagian dari statistik. kejahatan, bukan sebagai individu yang perlu dukungan psikososial dan Pendidikan. Kebutuhan hukum kelompok rentan di Indonesia menunjukkan bahwa hambatan seperti ketidaktersediaan informasi, stigma yang ada di Masyarakat, dan kurangnya bantuan hukum memperburuk situasi marginalisasi mereka. Fakta ini menunjukkan bahwa apabila negara tidak menyediakan system akses keadilan yang inklusif, Tindakan represif justru memperdalam jurang sosial yang ada. Lebih lanjut, secara institusional, kebijakan hukum di bawah rezim Nayib Bukele tampak tidak peka terhadap nondiskriminasi dan universalitas HAM. Kelompok rentan yang dalam hal ini, terkhusus untuk Perempuan dan anak-anak berpotensi menjadi korban ganda. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa pendampingan hukum dan edukasi publik, kelompok rentan tidak mampu memahami atau memperjuangkan hak-hak mereka, sehingga kesulitan mengakses bantuan atau perlindungan hukum. Bisa kita lihat, Di El Salvador Masyarakat dari lapisan bawah mengalami trauma sosial karena tidak mampu memastikan perlindungan hukum, yang kemudian memicu rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap institusi negara.

Bahkan, ketika pihak berwenang melakukan penahanan massal, sedikit sekali upaya diarahkan untuk mengkaji latar belakang social dan ekonomi terdampak. Tanpa akses pada program reintegratif, seperti pelatihan kerja, konseling, atau dukungan kelompok yang dapat membuat mantan narapidana akan terjebak dalam siklus marginalisasi yang diperkuat oleh stigma dan pengawasan negara. Padahal, pemulihan sosial dan keadilan substansial harus menjadi prioritas dalam kebijakan hukum, agar Masyarakat rentan tidak hanya dijadikan objek kontrol, tetapi juga subjek pemulihan kemanusiaan dan integrasi sosial. Selain itu, polarisasi yang terjadi akibat narasi perang melawan kriminal tanpa pembedaan individual turut merusak interaksi sosial. Kelompok rentan yang tidak dilindungi akan mengalami tekanan ganda, yang dalam hal ini sosial dan hukum. Mereka tidak hanya kehilangan akses fisik keadilan, tetapi juga ruang social untuk pulih dari trauma serta membangun jaringan solidaritas. Efek jangka panjangnya adalah melemahnya kepercayaan publik, keadilan, dan partisipasi warga dalam kegiatan sosial. Maka, sangat penting bagi kebijakan di El Salvador untuk mengadopsi strategi yang mengintegrasikan supremasi hukum dengan pertimbangan hak asasi manusia, terutama kelompok rentan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan Presiden Nayib Bukele dalam menanggukangi kriminalitas di El Salvador berhasil menurunkan angka kejahatan secara signifikan dan memberikan rasa aman bagi

Masyarakat. Namun, keberhasilan ini menyimpan paradoks yang kompleks. Di satu sisi, stabilitas keamanan tercapai, tapi di sisi lain pendekatan yang digunakan cenderung represif dan mengarah pada konsolidasi kekuasaan yang melemahkan prinsip-prinsip demokrasi. Penggunaan narasi populis serta mobilisasi dukungan melalui ketakutan telah menjadikan keamanan sebagai alat legitimasi politik, bukan sebagai produk dari proses demokratis yang inklusif. Konsekuensinya, kelompok rentan seperti Masyarakat berpenghasilan rendah, wanita, dan anak-anak menjadi korban utama dari sistem hukum yang diskriminatif dan tidak berpihak. Penurunan kejahatan yang didapat dengan mengorbankan sipil, supremasi hukum, dan modal sosial mengarah pada risiko jangka Panjang berupa rusaknya kepercayaan terhadap negara dan melemahnya kohesi sosial.

Pemerintah El Salvador perlu mengkaji ulang pendekatan keamanan yang terlalu berorientasi pada penindakan dan mempertimbangkan reformasi kebijakan yang lebih berimbang antara aspek keamanan dan perlindungan hak asasi manusia. Dibutuhkan upaya memperkuat Lembaga-lembaga demokrasi fungsi *check and balances* dapat berjalan optimal. Strategi yang digunakan seharusnya tidak hanya menargetkan penindakan kejahatan, tetapi juga menciptakan kondisi sosial yang mencegah kriminalitas sejak akar, seperti memperluas akses Pendidikan, pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk membuka ruang partisipasi sipil, menjamin kebebasan berekspresi, dan membangun Kembali kepercayaan antara negara dan Masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dengan begitu, keberhasilan dalam menekan angka kriminalitas tidak hanya mengorbankan demokrasi dan kesejahteraan manusia sebagai pilar utama Pembangunan jangka Panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Acharya, A. (t.thn.). 2007. *Human Security. Contemporary Security Policy*, 27(3), 441-460.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. *SAGE Publications*.
- Cuéllar, J. E. (2020). El Salvador's Two Pandemics: Maximum Insecurity. *El Salvador's Two Pandemics: Maximum Insecurity*.
- Fitrah, E. (2015). Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. *Insignia: Journal of International Relations*.
- Guevara-Rosas, E. (2024). El Salvador: Mil días del régimen de excepción: modelo de seguridad a costa de derechos humanos. *Amnesty International*.

- Levitsky, S. &. (2022). The New Competitive Authoritarianism. *Journal of Democracy*, 33(2), 65-80.
- López, C. (2023). Balancing Violence Reduction and Human Rights in El Salvador. *LatinAmerican Post*.
- Martínez., J. G. (2025). Bukele cumple seis años convertido en el presidente todopoderoso de El Salvador. *El País*.
- McCoy, J. (2023). The Rise of Electoral Autocracy in El Salvador. *Journal of Democracy*.
- Meléndez-Sánchez, M. &. (2024). The Bukele Model: Will It Spread? *Journal of Democracy*.
- Pollak, J. (2024). Emotional Authoritarianism: Bukele's El Salvador and Fear Driven Backsliding. *Columbia Political Review*.
- Prakasa, S. U. (2021). Dinamika Perlindungan HAM Bagi Masyarakat Marjinal di Era Society 5.0. *UM Surabaya Publishing*.
- Putri, D. F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Rentan dalam Kebijakan Kriminalisasi. *Jurnal Hukum dan HAM*.
- Rosen, J. D., Cutrona, S., & Lindquist, K. (2022.). Gangs, violence, and fear: punitive Darwinism in El Salvador. *Crime, Law and Social Change*. 79(2), 175-194.
- Sriwidodo, J. (2020). Hukum dalam Perspektif Sosiologi dan Politik di Indonesia. *Kepel Press*.
- Wahyuni, S. (2023). Politik Populis dan Ketakutan Kolektif: Analisis Narasi Pemerintah dalam Krisis. *Jurnal Ilmu Politik Universitas Islam Indonesia*.
- Watch, H. R. (2023). *World Report 2023: El Salvador*.
- IACHR,. (2024). *El Salvador STATE OF EMERGENCY AND HUMAN RIGHTS*.